

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan:

“Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.”

Otonomi daerah diikuti dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

Dalam artikel yang berjudul “*Improving Local Government Finance in a Changing Environment*” tahun 1997, Kim memaparkan bahwa desentralisasi ialah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Risetnya menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mungkin memainkan peran penting dalam proses dan hasil dari desentralisasi, yaitu:

1. Sifat dan peraturan lembaga yang lebih spesifik untuk mengatur hubungan fiskal antar pemerintah, bagaimana pemerintah daerah akan diberikan wewenang dalam menentukan objek pajak, dalam menetapkan tingkat pajak dan retribusi.

2. Menentukan dampak desentralisasi terhadap keuangan pemerintah daerah dan kapasitas pemerintah daerah. Ada kekhawatiran tentang kurangnya keahlian teknis pemerintah daerah dan tanggung jawab untuk menanganipengeluaran yang ada dan menghasilkan pendapatan.
3. Sistem insentif kelembagaan tergantung pada pemerintah yang beroperasi, dengan asumsi bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan otonomi daerah atas kepentingan utamanya, dengan kata lain bahwa pemerintah pusat akan sepenuhnya memikirkan bagi kelangsungan jangka panjang daerah bukan dikarenakan keinginan untuk tetap berkuasa dan saling bersaing diantara tingkat pemerintahan.

Selain desentralisasi, peran sektor swasta juga merupakan alternatif dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan keterlibatan sektor swasta, maka pemerintah perlu menyediakan kerangka peraturan yang tepat guna memastikan persaingan yang sehat untuk tercapainya efisiensi, seperti yang dikutip dalam artikel Kim (1997:19), “By providing the right regulatory framework and by ensuring fair competition among potential private suppliers, the local government can reap efficiency gain.”

Sebagai salah satu Daerah Otonom, Kabupaten Agam yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, telah diberi kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Jika dilihat dari keempat komponen PAD, Pendapatan Kabupaten Agam terbesar sampai dengan tahun 2014 masih terletak pada

Dana Perimbangan, ini dibuktikan untuk tahun 2015 besarnya target pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar Rp.870.000.000.000,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.267,156 miliar dan yang paling terendah ialah pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.75,048 miliar. Namun, jika dinilai dari empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam menunjukkan trend yang baik, pada 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen, sementara laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sebesar 5,12 persen, khususnya pada daerah Sumatera Barat yang pada saat itu hanya mencapai 5,84 persen.

Tabel 1.1
Realisasi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Agam
(2010-2014)

Tahun	Realisasi PAD	Peningkatan
2010	Rp 22,9 miliar	65,10 persen
2011	Rp 37,8 miliar	97,1 persen
2012	Rp 41,5 miliar	20,16 persen
2013	Rp 49,9 miliar	40,23 persen
2014	Rp 79,4 miliar	113,46 persen

Sumber :<http://www.koran.padek.co/read/detail/18730>
(Diakses tanggal 5 Agustus 2015)

Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa realisasi PAD tiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan PAD ini terjadi karena meningkatnya pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, berdasarkan data statistik dari BPS, kinerja makroekonomi dan

kesejahteraan rakyat memperlihatkan perkembangan yang baik. Peningkatan itu dipicu dengan meningkatnya nilai tambah pada sektor utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni, sektor pertanian pada tahun 2014 sebesar Rp4,05 triliun, atau meningkat Rp1,37 triliun dari tahun 2010, sektor jasa-jasa sebesar Rp1,5 triliun, kemudian sektor industri pengolahan mencapai Rp1,1 triliun, sektor perdagangan, hotel dan restaurant sebesar Rp1,62 triliun. Capaian ini berkat upaya bagaimana menata regulasi, memperbaiki sistem pemungutan serta pengadaan sarana pendukung.

Peningkatan tersebut diiringi juga dengan relatif meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Hal itu ditunjukkan oleh rendahnya indeks ketimpangan pendapatan masyarakat atau indeks gini ratio hanya sebesar 0,265, lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang mencapai 0,338. Itu membuktikan distribusi pendapatan masyarakat Agam lebih merata jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Dengan adanya peningkatan tersebut, dapat dinyatakan bahwa ini berarti mencerminkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Jika dilihat dari keempat komponen PAD tersebut, terlihat bahwa yang menjadi sumber pendapatan terbesar ialah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Agam sebagai Daerah Otonom.

Masalah mengenai otonomi daerah ini juga pernah di angkat dalam artikel Kyung-Hwan Kim pada tahun 1997, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan kemitraan dengan sektor swasta memerlukan peran penting dari pemerintah pusat. Kemauan politik untuk berbagi kekuasaan dan sumber daya menentukan tingkat dan laju desentralisasi. Pemerintah pusat harus memfasilitasi desentralisasi dengan cara memberikan insentif yang tepat, menetapkan peraturan-peraturan yang memungkinkan serta memberikan bantuan teknis dan pelatihan, selain itu pemerintah seharusnya juga mengatasi kesenjangan fiskal antar pemerintah melalui mekanisme pendanaan khusus untuk pemda yang kurang beruntung.

Penelitian tentang Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Taluke Tahun 2013 dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat (Periode 2007-2011)”. Akan tetapi ada keterbatasan dalam penelitian Taluke (2013), yaitu dalam penelitian tersebut hanya melakukan analisis pada kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah saja, jadi penulis mencoba melengkapi penelitian sebelumnya dengan melakukan analisis terhadap efektivitas pajak dan retribusi daerah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Taluke ialah terletak pada objek dan tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sedangkan objek penelitian oleh

Taluke ialah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara yang dilakukan pada periode 2006-2010.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan, efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Agam tahun 2010-2014?
2. Seberapa besar efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam tahun 2010-2014?
3. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam tahun 2010-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Agam tahun 2010-2014.
2. Mengetahui seberapa besar efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam tahun 2010-2014.

3. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam tahun 2010-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman tentang peran pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. Acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak dan retribusi. Selain itu dapat memberikan informasi tentang laju pertumbuhan dan analisis trend pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran atau alur penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Jenis Penelitian, Subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait.

